

“ IMPLEMENTASI PUTUSAN PIDANA MINIMAL DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA ”

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :
Danu Adi Pratomo
NPM. 0871010110

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
“ IMPLEMENTASI PUTUSAN PIDANA MINIMAL DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA ”

Disusun Oleh:

DANU ADI PRATOMO
NPM. 0871010110

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Yana Indawati,SH,Mkn
NIP. 3 7901 07 0224

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro,SH,MM
NIP/NPT 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
“ IMPLEMENTASI PUTUSAN PIDANA MINIMAL DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA ”

Oleh:
DANU ADI PRATOMO
NPM. 0871010110

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur
Pada Tanggal

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji
1.

Sutrisno, SH.,M.Hum
NIP/NPT 19601212 198803 1 001

Sutrisno,SH.,M.Hum
NIP/NPT 19601212 198803 1 001
2.

Pembimbing Pendamping

Yana Indawati,SH,Mkn
NIP/NPT 3 7901 07 0224

Haryo Sulistiyantoro,SH.,MM
NIP/NPT 19620625 199103 1 001
3.

Subani.SH.,M.Si
NIP/NPT 19510504 198303 1 001

Mengetahui,
DEKAN

Haryo Sulistiyantoro,SH.,MM
NIP/NPT 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
“ IMPLEMENTASI PUTUSAN PIDANA MINIMAL DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA ”

Oleh:

DANU ADI PRATOMO
NPM 0871010110

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur

Pada Tanggal 30 April 2012

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji

1.

Sutrisno, SH.,M.Hum
NIP/NPT 19601212 198803 1 001

Sutrisno,SH.,M.Hum
NIP/NPT 19601212 198803 1 001

2.

Pembimbing Pendamping

Yana Indawati,SH,Mkn
NIP/NPT 3 7901 07 0224

Haryo Sulistiyantoro,SH.,MM
NIP/NPT 19620625 199103 1 001

3.

Subani.SH.,M.Si
NIP/NPT 19510504 198303 1 001

Mengetahui,
DEKAN

Haryo Sulistiyantoro,SH.,MM
NIP/NPT 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANU ADIPRATOMO
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 21 Juli 1989
NPM : 0871010110
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : JL.Mastrip no 75 karang pilang surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul:

“ IMPLEMENTASI PUTUSAN PIDANA MINIMAL DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA ”

dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya
bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum)
yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa
tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Surabaya, 12 April 2012

Mengetahui,

PEMBIMBING UTAMA

PENULIS

Materai 6000

(Sutrisno, SH, M.Hum)
NIP.196010212 198803 1 001

(Danu Adi Pratomo)
NPM.0871010110

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT serta Shalawat dan Salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini peneliti mengambil judul:

“ IMPLEMENTASI PUTUSAN PIDANA MINIMAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA ”

Penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu dapat memberikan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penelitian dalam mengadakan penelitian guna penyusunan Skripsi.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan oleh beberapa pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur selaku Dosen Pembimbing Utama.
3. Bapak Drs. Ec. Gendut Sukarno, M.S selaku Wakil Dekan II Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
4. Bapak H.Yopi S.H. M.H selaku Pembina dan Hakim Pengadilan TIPIKOR Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
5. Bapak Subani S.H. M.si selaku Kepala studi ilmu hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” jawa timur.

6. Ibu Yana Indawati, SH, Mkn Selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pembuatan skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak Sariyanto selaku Kepala Bagian Tata Usaha beserta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Kedua orang tua tercinta dan seluruh saudara-saudara yang telah memberikan dukungan moriil maupun materiil serta doa dan restunya selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan dan seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun peneliti harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, April 2012

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Danu Adi Pratomo
NPM : 0871010110
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Juli 1989
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

“ IMPLEMENTASI PUTUSAN PIDANA MINIMAL DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA ”

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Putusan Hakim Pengadilan TIPIKOR Surabaya terhadap Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui kesesuaian pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat yuridis empiris, karena adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan TIPIKOR Surabaya pada dasarnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan hanya menjatuhkan pidana minimal yang tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim Pengadilan TIPIKOR Surabaya sudah memandang urgensi pada Pasal 183 dan 184 KUHAP. Hasil penelitian ini diharapkan memberi dasar dan landasan untuk penelitian lebih lanjut serta memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana dan mempraktikkannya di lapangan. Manfaat praktisnya adalah dapat memberikan data dan informasi mengenai putusan hakim Pengadilan TIPIKOR Surabaya Hasil penelitian ini pun dapat menjadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia serta memberantas tindak pidana korupsi di berbagai kalangan.

Kata kunci : pidana minimal, korupsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Perumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian.....	9
5. Kajian Pustaka.....	10
6. Metode Penelitian.....	39
BAB II PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MINIMAL OLEH HAKIM PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA	
1. Perincian Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Ditangani Oleh Pengadilan Tipikor Surabaya.....	45

2. Pengaruh Penerapan Pidana Minimal Terhadap Jumlah Kasus Tipikor di Pengadilan Tipikor Surabaya.....	47
---	----

3. Analisis Penerapan Pidana Minimal Atas Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya.....	50
--	----

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA MINIMAL TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA

1. Gambaran Pertimbangan Hakim Tipikor di Pengadilan Tipikor Surabaya Dalam Menjatuhkan Pidana Minimal.....	56
2. Faktor – faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Minimal.....	58

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	63
2. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Surat Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan

Lampiran 2: Berita Acara Sita Eksekusi

Lampiran 3: Penetapan

Lampiran 4: Akta Pemberian Hak Tanggungan

Lampiran 5: Sertifikat Hak Tanggungan (SHT No. 4032/2005)

Lampiran 6: Sertifikat Hak Tanggungan (SHT No. 6051/2005)

Lampiran 7: Turunan Pengakuan Hutang

Lampiran 8 : Turunan Akta Akad Jual beli Al- Murabaha No. 8

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu momok bagi setiap negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat. Dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara Indonesia ini. Memberantas dan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi tidaklah mudah seperti membalikkan tangan. Tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara mereka sekelompok orang tersebut akan saling menutupi. Sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya.

Perekonomian Indonesia makin merosot dan Inflasi menggila. Gaji yang diterima orang, termasuk gaji hakim, jaksa, polisi dan pegawai negeri lainnya, makin jauh tidak bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya agar bisa hidup layak sesuai martabatnya. Dua faktor itu, yakni hilangnya kemandirian hakim yang berakibat hilangnya kebanggaan seorang hakim terhadap profesinya sebagai hakim dan tidak cukupnya gaji untuk bisa hidup layak bagi dirinya dan keluarganya mempercepat proses menjadi korupsi lembaga peradilan sebab hakim lebih mudah dibeli karena mendesaknya tuntutan memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar dan makin hilangnya kebanggaan menjadi seorang hakim mengingat hakim semakin kehilangan independensinya¹.

Menurut Evi Hartanti, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survey Transparency International Indonesiaan (TII) menunjukkan,

Dalam survei yang dilakukan terhadap 183 negara di dunia tersebut, Indonesia menempati skor CPI sebesar 3,0, naik 0,2 dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,8."Namun, lompatan skor Indonesia dari 2,8 pada tahun 2010 dan 3,0 tahun 2011 bukanlah pencapaian yang signifikan karena Indonesia sebelumnya telah menargetkan mendapatkan skor 5,0 dalam CPI 2014 mendatang," ujar Ketua Transparency International (TI) Indonesia Natalia Subagyo saat melakukan jumpa pers di Graha CIMB, Jakarta, Kamis (1/12/2011). Hasil survei tersebut

¹ Trimoelja D. Soerjadi, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal 3

berdasarkan penggabungan hasil 17 survei yang dilakukan lembaga-lembaga internasional pada 2011. Rentang indeks berdasarkan angka 0-10. Semakin kecil angka indeks menunjukkan potensi korupsi negara tersebut cukup besar. Dalam indeks tersebut Indonesia berada di peringkat ke-100 bersama 11 negara lainnya yakni Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname, dan Tanzania. Sementara untuk kawasan Asia Tenggara, skor Indonesia berada di bawah Singapura (9,2), Brunei (5,2), Malaysia (4,3), dan Thailand (3,4).

Lahirnya Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat banyak ketentuan baru mengenai korupsi, baik hukum materiil maupun hukum formalnya semangat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi dapat dilihat juga dari sebagian program kerja 100 hari tahun 2009 dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tekad memberantas korupsi di Indonesia sampai keakar-akarnya. Harapan kedepan pembuktian perkara korupsi akan lebih baik dan dapat menjunjung nilai keadilan. Strategi penegak hukum tersebut menjadi semakin relevan berhubung dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tertanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berbagai macam kesulitan dihadapi oleh aparat yang berwenang untuk menyeret pelaku korupsi tersebut. Dan upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui inpres no 5 tahun 2004 itu

mempunyai hambatan yang disebabkan karena ada tekanan politis yang berasal dari campur tangan eksekutif maupun legislatif, atau dikarenakan oleh rumitnya birokrasi di peradilan. Tidak hanya itu, tidak jarang aparat penegak hukum juga ikut “bermain” dalam melindungi pelaku korupsi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kasus korupsi sulit untuk diberantas².

Keberhasilan suatu penegakan hukum amat bergantung kepada keberadaan institusi dari aparat penegak hukum sebagai penggerakannya. Baik buruknya penegak hukum akan tercemin dari pelaku aparat penegak hukum itu sendiri, aparat penegak hukum tidak saja dituntut untuk mewujudkan hukum tetapi juga dituntut harus profesional dan proposional. Lalu bagaimana jika aparat penegak hukum dalam hal ini hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan vonis (sanksi) terhadap koruptor yang justru melakukan tindakan – tindakan yang tidak terpuji. Seperti memberikan vonis yang ringan terhadap koruptor yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan sangat merugikan negara.

² <http://www.antikorupsi.org>. hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2011, jam 09.00 wib,

Fakta tersebut di dukung oleh data – data dari Pengadilan
 TIPIKOR Surabaya sebagai berikut :

DATA KASUS KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA

TAHUN 2011.

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Perkara Putus	Sisa ini
01	Januari	9	20	-	29
02	Pebruari	29	8	-	37
03	Maret	37	10	5	42
04	April	42	12	4	50
05	Mei	50	15	8	57
06	Juni	57	12	8	61
07	Juli	61	10	9	62
08	Agustus	62	4	14	52
09	September	52	16	14	54
10	Oktober	54	25	9	70
11	Nopember	70	15	1	84
12	Desember	84	26	2	108
Jumlah Total			173	74	99

DATA KASUS KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA TAHUN 2012.

No	Bulan	Sisa tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Putus	Sisa ini
01	Januari	108	16	-	124

PUTUSAN MINIMAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN

TIPIKOR SURABAYA SELAMA 2011 – 2012.

Tahun	Jumlah perkara	Putusan Inkracht	Putusan minimal
2011	173	74	29
2012	45	-	-

Data ini dari Pak Dolla dan Ibu yulia s. S.H bagian administrasi Tindak Pidana Khusus.

Tanggal 31-01-2012 jam 09.00.

Dari data di atas menyatakan bahwa hampir 45% Hakim TIPIKOR di Pengadilan TIPIKOR Surabaya memutus perkara korupsi dengan putusan / vonis minimal ancaman pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari perkara yang masuk di Pengadilan Tipikor Surabaya sejumlah 189 kasus pada tahun 2011 dan 2012 namun yang sudah diputus sejumlah 74 kasus yang mempunyai kekuatan hukum tetap / inkracht. Dan dari 74 kasus tersebut terdapat 29 kasus korupsi yang diputus dengan vonis minimal pidana. Kemudian akibat itu terjadilah polemik di masyarakat yang mempertanyakan bagaimana keseriusan aparaturnya penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia ini.

Mengenai pidana minimal yang diterapkan dalam putusan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Lalu apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana minimal tindak pidana korupsi. Dan diharapkan pada nantinya para hakim dan praktisi penegak hukum dapat mengerti mengenai akibat jika yang diterapkan hanya hukuman minimal saja. Untuk memberikan efek jera koruptor

hakim harus memandang urgensi dari Undang-Undang Tipikor agar menghasilkan putusan yang baik dan benar.

2. Rumusan Permasalahan

Perumusan masalah dalam suatu penelitian yang tegas dapat menghindari pengumpulan bahan hukum yang tidak diperlukan, sehingga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai dan mempermudah penulis dalam mencapai sasaran. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti, yang dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data. Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian yang akan dikaji maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana penerapan ketentuan pidana minimal oleh hakim tipikor di Pengadilan tipikor Surabaya ?
- B. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana minimal tindak pidana korupsi ?

3. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu baik tujuan obyektif maupun tujuan subyektif. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

3.1. Tujuan Obyektif

- 1). Dapat mengetahuinya hal-hal mengenai pentingnya batasan penerapan pidana minimal yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sesuai dengan Undang-Undang Tipikor.
- 2). Pembaca dapat mengetahui kasus posisi dan konstruksi hukumnya mulai dari dakwaan sampai dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam Persidangan Perkara Korupsi.
- 3). Untuk mengetahui kewenangan dan kebijakan hakim Pengadilan Tipikor dalam menentukan ketentuan pidana minimal bagi pelaku tindak pidana korupsi.

3.2 Tujuan Subjektif

- 1). Guna menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana yang sangat berarti bagi penulis.
- 2). Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.

4. Manfaat Penelitian

Harapan Penulis mengutarakan mengenai kejahatan korupsi dalam penelitian hukum ini agar memberikan manfaat positif bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

4.1 Manfaat Teoritis

- 1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang pembedaan dan prosedur beracara sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum acara pidana pada umumnya dan tindak pidana khusus.
- 3). Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

4.2. Manfaat Praktis

- 1). Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- 2). Dapat memberikan data atau informasi tentang proses persidangan di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan hambatan – hambatan penegakan hukumnya, terutama penerapan pidana minimal bagi pelaku korupsi.

- 3). Hasil Penelitian ini dapat menjadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia serta memberantas tindak pidana korupsi di berbagai kalangan baik atas maupun bawah tingkatan.

5. Kajian Pustaka

5.1 Tinjauan Umum tentang Ketentuan Pidana Minimal dalam UU Tipikor

5.1.1 Pengertian Pidana Minimal (straf minimum)

Dalam penerapan hukuman pidana terdapat pidana minimal dan pidana maksimal yang mana keduanya sudah terdapat ketentuan masing-masing sesuai undang-undangnya. Pidana minimal adalah ketentuan dimana batas minimal Hakim dalam memutus perkara berdasar Undang-Undang dan mempertimbangkan Tuntutan Jaksa.

5.1.2 Kajian Pidana Minimal dalam Undang-Undang Korupsi

Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur batas hukuman minimal dan batas hukuman pidana maksimalnya, sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan aneh, yang dirasa tidak adil. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat banyak terjadi ketidakadilan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena adanya perumusan aturan hukuman minimum yang bilamana dipikir-pikir sangatlah tidak

adil. Yang dimana dalam rumusan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang–Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 yang sudah diubah dengan undang–undang nomor 20 tahun 2001, walaupun sudah terjadi perubahan dalam undang–undang ini, namun dalam hal pengaturan hukuman minimalnya tetap pada rumusan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang–undang nomor 31 tahun 1999.

Dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI yang menetapkan sistem aturan hukuman minimal telah memposisikan lamanyaPidana dalam kedua Pasal tersebut berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pidana umum yang sudah berlaku di Indonesia. Dalam isi Pasal 2 (1), Undang–undang ini adalah adanya larangan bagi setiap orang dengan tidak memandang apakah ia dalam posisi menduduki suatu jabatan tertentu, atau sedang memiliki suatu kewenangan tertentu jika ia terbukti melakukan perbuatan memperkaya kaya diri sendiri atau orang lain, atau koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara maka ia dapat dipidana, dengan Pidana Penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, dalam unsur pasal 2 ini adalah memperkaya diri sendiri atau koorporasi yang merugikan keuangan negara. Sedangkan dalam isi Pasal 3 yang memuat adanya unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan, hanya dipidana dengan Pidana Penjara sekurang-kurangnya selama 1 (satu) Tahun.

Ada beberapa hal yang merupakan penerapan ketentuan-ketentuan baru diantaranya :

- 1) Adanya beban pembuktian terbalik, tindak Pidana Korupsi yang nilainya kerugian Negaranya sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta), rupiah Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan adanya tindak Pidana Korupsi, sedang terhadap tindak pidana korupsi yang nilainya diatas Rp.10.000.000,-(sepuluh juta) rupiah. terdakwa yang membuktikan bahwa uang tersebut bukan berasal dari tindak Pidana Korupsi.
- 2) Adanya pemberlakuan Straf minimum khusus, hal ini diberlakukan bagi delik korupsi yang nilainya Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah atau lebih.
- 3) Pengambil alihan beberapa Pasal dari KUHP, menjadi Pasal-Pasal delik Korupsi dan mencabut Pasal-Pasal tersebut dari KUHP

5.2 Tinjauan Umum tentang Korupsi.

5.2.1 Pengertian Korupsi

Dalam ensiklopedia Indonesia istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin: (corruption = penyuapan; corruptore = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara

menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya. Adapun arti harfia dari korupsi dapat berupa :

- a. Kejahatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.
- c. Korup (busuk; suka menerima uang suap, uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.
- d. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya);
- e. Koruptor (orang yang korupsi).

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie* atau *Corruptus*. Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpore*, suatu kata latin kuno. Dari bahasa latin inilah, istilah *Corruptio* turun ke banyak bahasa Eropa, seperti inggris: *Corruption*, *Corrupt*; Prancis: *Corruption*; dan Belanda: *Corruptie* (*korruptie*) Baharuddin Lopa sebagai seorang penegak Hukum yang disegani mengutip pendapat dari David M. Chalmers, yang menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang

berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.³

5.2.2. Pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian pesatnya dan modus operandi tindak pidana korupsi semakin canggih dan variatif, sedangkan di lain pihak perkembangan hukum (Law in book)

³ Lilik Mulyadi. Tindak Pidana Korupsi. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2000, hal 4

relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Secara Yuridis Formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 serta Bab III tentang Tindakan Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suatu perbuatan atau tindakan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi.

Demikian halnya suatu tindak pidana untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000, dan paling banyak Rp 1.000.000.000,.”

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditarik unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

a. Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum

Unsur secara “ melawan hukum “ disini dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

b. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Korporasi Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri disini adalah dengan perbuatan melawan hukum tersebut si pelaku bertambah kekayaannya. Sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya.

c. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara

adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 21 tahun 2001. Menurut Undang-Undang tersebut, ada beberapa jenis korupsi yang Sering Terjadi di Dalam Lingkungan Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat yaitu :

A. Korupsi yang merugikan uang negara :

1. Mencari untung dengan cara yang melawan hukum dan merugikan negara di rumuskan dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun

atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-. Dapat dikategorikan sebuah tindakan korupsi jenis ini jika memenuhi unsur-unsur:

- a. Setiap orang;
 - b. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
 - c. Dengan cara melawan hukum;
 - d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari untung dan merugikan negara definisi dari korupsi jenis ini sama seperti korupsi yang merugikan negara tetapi ada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Diatur dalam pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-. Dapat dikategorikan sebuah tindakan korupsi jenis ini jika memenuhi unsur-unsur:
- a. Setiap orang;
 - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana;
 - d. Yang padanya karena jabatan atau kedudukan;
 - e. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

C. Korupsi yang berhubungan dengan suap-menyuap:

1. Menyuar pegawai negeri

Suap, sogokan, uang pelicin merupakan tindakan yang bisa dianggap sebagai tindak korupsi jika memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, yaitu:

- a. Setiap orang;
- b. Memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
- c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;

- d. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp. 250.000.000,-
2. Memberi hadiah ke pegawai negeri karena jabatannya.

Tindak korupsi seperti ini hampir sama seperti tindak korupsi sebelumnya karena merupakan variasi dari tindak korupsi sebelumnya perbedaannya karena menyuap seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang dikarenakan jabatan atau wewenang tersebut dapat menguntungkan seseorang yang menyuap tersebut. Unsur-unsur terdapat dalam pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001:

- a. Setiap orang;
- b. Memberi hadiah atau janji;
- c. Kepada pegawai negeri;
- d. Dengan mengikat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap telah melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Diancam hukuman maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp. 150.000.000,-

3. Pegawai negeri menerima suap

Dalam kasus seperti ini tidak hanya pemberi suap saja yang dianggap bersalah tetapi pegawai negeri yang menerima uang suap tersebut bisa ditangkap. Semua diatur dalam pasal 5 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 yang memiliki unsur-unsur:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Menerima pemberian atau janji;
- c. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)

huruf a atau b. Diancam dengan hukuman 5 tahun atau denda maksimal Rp. 250.000.000,-

4. Menyuap hakim

Menyuap hakim agar dapat menguntungkan pihak yang memberi suap dalam menjalankan tugasnya memimpin sidang merupakan suatu tindak korupsi. Unsur-unsur tindak korupsi tersebut menurut pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 adalah:

- a. Setiap orang ;
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- c. Kepada hakim;
- d. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun denda maksimal Rp. 750.000.000,-.

5. Menyuap advokat

Menyuap advokat atau pengacara atau pembela merupakan suatu tindak korupsi. Unsur-unsur menurut pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 21 tahun 2001 adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- c. Kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan;
- d. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan pada pengadilan untuk diadili. Diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp. 750.000.000,-.

6). Hakim menerima suap

Merupakan suatu tindak korupsi jika seorang hakim terbukti menerima suap untuk memenangkan suatu perkara dalam sidang peradilan. Sesuai dengan pasal 12 huruf c UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, memiliki unsur-unsur:

- a. Hakim;
- b. Menerima hadiah atau janji;
- c. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-.

7. Advokat menerima suap

Advokat yang terbukti menerima suap merupakan suatu tindakan korupsi. Unsur-unsur korupsi jenis ini menurut pasal 12 huruf d UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 21 tahun 2001, adalah:

- a. Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan;
- b. Menerima hadiah atau janji;
- c. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Diancam hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-.

C. Korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan:

1. Pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang

Merupakan suatu tindakan korupsi pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang. Perihal tersebut diatur dalam pasal 8 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, menyebutkan unsur-unsur korupsi jenis ini adalah:

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
 - b. Dengan sengaja Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan tertentu;
 - c. Uang atau surat berharga;
 - d. Yang disimpan karena jabatan. Diancam dengan penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp. 750.000.000,-.
2. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi

Pemeriksaan administrasi memiliki arti yang beragam; mulai dari pemeriksaan keuangan sampai pemeriksaan jmlah peralatan kantor. Buku berarti banyak mulai dari laporan keuangan sampai dengan daftar peralatan kantor. Unsur-unsurnya, seperti yang disebut dalam pasal 9 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 adalah:

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan sesuatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
 - b. Dengan sengaja Memalsu;
 - c. Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- Diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 250.000.000,-.

3). Pegawai negeri menghancurkan bukti

Bukti disini berupa akta, surat atau daftar yang dipakai sebagai bukti atas suatu benda atau kegiatan. Menurut pasal 10 huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, unsur-unsur dalam jenis ini adalah:

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu;
 - b. Dengan sengaja;
 - c. Menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai;
 - d. Barang, akta surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang;
 - e. Yang dikuasai karena jabatan.
- Diancam dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp. 350.000.000,-.

C. Korupsi yang berhubungan dengan pemerasan:

Pegawai negeri memera, Pemerasan dalam hal ini adalah pemerasan yang paling mendasar: karena pegawai negeri tersebut mempunyai kekuasaan, dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Unsur-unsur korupsi jenis ini menurut pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 adalah:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - c. Secara melawan hukum;
 - d. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
 - e. Menyalahgunakan kekuasaan.
- Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-.

E. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan:

Rekan TNI/POLRI curang, Tindak korupsi seperti ini sering terjadi dalam pengadaan keperluan TNI dan kepolisian. Korupsi jenis ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan perbuatan curang;
- c. Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI;
- d. Dapat membahayakan keselamatan dalam keadaan perang.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp. 350.000.000,-.

F. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan;

Pegawai negeri mengikuti pengadaan yang seharusnya diurus olehnya: Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk menghadirkan barang atau jasa dipilih setelah melewati proses penyeleksian (tender). Unsur-unsur korupsi jenis ini disebut dalam pasal 12 huruf I UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001, yaitu:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Dengan sengaja;
- c. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;
- d. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda Rp. 1.000.000.000,-.

G. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah):

Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan kepada KPK. Korupsi dalam gratifikasi

dijelaskan dalam pasal 12B UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 dan 12C UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Disebutkan unsur-unsurnya adalah:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Menerima gratifikasi;
- c. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- d. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-.

5.3. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

5.3.1. Pengertian Hakim

Pejabat penegak hukum yang paling dominan dalam pelaksanaan penegakan hukum ialah hakim. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Kedudukan Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan

aktif memperhatikan dan melaksanakan macam - macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara.⁴

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya Kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum

⁴ Wirjono Prodjodikoro. Bunga Rampai Hukum: Ichtiar Baru. Jakarta 1974. hal 9

berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin. Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHP.⁵

⁵ Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika . Jakarta 2005, hal 6

2. Pengertian Putusan

Istilah putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan⁶.

Merupakan akhir dari semua proses mencari, mengumpulkan, memeriksa dan menilai alat bukti. Putusan hakim mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu di dalam menjatuhkan putusannya hakim diharapkan agar selalu berhati-hati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai suatu putusan penuh dengan kekeliruan yang akibatnya akan menimbulkan rasa tidak puas, ketidakadilan dan dapat menjatuhkan kewibawaan pengadilan. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, *banding*, atau *kasasi*; melakukan *grasi*; dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kearifan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan⁷.

Di dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah : “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau

⁶ Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta. 2006, hal 5

⁷ Lilik Mulyadi. Tindak Pidana Korupsi: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000, hal 7

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini ”.

5.4 Jenis Putusan

Menurut KUHAP, secara doktrin serta aspek teoritik dan praktek peradilan maka pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

5.4.1 Putusan akhir

”Putusan akhir” dalam praktik lazim disebut dengan istilah ”putusan” atau ”eind vonnis” dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan akhir dapat terjadi setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan ”pokok perkara” selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 197, serta Pasal 199 KUHAP).

5.4.2 Putusan yang bukan putusan akhir

Bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa ”penetapan” atau ”putusan sela” atau dengan istilah bahasa Belanda ”tussen-vonnis”. Pada hakekatnya putusan ini dapat berupa :

- 1) Penetapan yang menentukan ”tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara” karena merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri lain

sebagaimana limitatif Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/ penuntut umum batal demi hukum, yang diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/ penuntut umum tidak telah kedaluwarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan telah nebis in idem, dan sebagainya. dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut.

Selanjutnya "penetapan" atau "putusan sela" secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Tetapi secara materiil perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa atau penuntut umum melakukan perlawanan atau verzet yang dibenarkan, sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

5.5 Bentuk Putusan

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat

dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁸

Berdasar kemungkinan - kemungkinan dari hasil musyawarah diatas, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk :

5.5.1. Putusan bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) yang berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau "acquittal", yakni terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan :

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus tidak diyakini oleh hakim.
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, hal ini

⁸ M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta.2005,hal 12

bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP.

5.5.2 Putusan pengelepasan dari segala tuntutan hukum

Putusan pengelepasan dari segala tuntutan hukum atau biasa disebut dengan "onslag van recht vervolging" diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yang bunyinya : "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum." Dari bunyi Pasal diatas, kiranya putusan penganlepasan dari segala tuntutan hukum didasarkan pada kriteria :

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

5.5.3. Putusan pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 yang berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan pada penilaian pengadilan.

5.5.4 Penetapan tak berwenang mengadili

Kemungkinan dapat terjadi sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara, oleh sebab itu Pasal 147 memperingatkan agar setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan ketua pengadilan negeri adalah mempelajari berkas perkara. Jika suatu perkara bukan merupakan kewenangan suatu pengadilan negeri untuk mengadili, maka untuk itu pengadilan negeri mengeluarkan surat "penetapan" tidak berwenang mengadili.

5.5.5 Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Jika terdakwa atau penasehat hukum keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkannya untuk selanjutnya mengambil keputusan.

5.5.6 Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Putusan pengadilan yang didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) ini dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, baik karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan pokok yang dapat dijadikan dasar menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum adalah :

- 1) Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang didakwakan.
- 2) Tidak memperinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam dakwaan.
- 3) Dakwaan kabur karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan dilakukan.

5.6. Hal yang Harus Dipenuhi dalam Putusan Hakim

Secara umum formalitas yang harus ada dalam suatu putusan hakim baik terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi maupun Tindak pidana lainnya bertitik tolak pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Dari ketentuan tersebut sedikitnya

10 (sepuluh) buah elemen harus terpenuhi. Dan menurut ayat (2) Pasal tersebut, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi kecuali yang tersebut pada huruf g dan i, maka putusan batal demi hukum (*vanrechtswege nietig*). Ketentuan-ketentuan formalitas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kepala putusan yang berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan KETUHANAN Yang Maha Esa” ;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ;

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera⁹.

5.7. Tinjauan Umum tentang Pembuktian menurut Keyakinan Hakim dan Alat Bukti

Dalam Pembuktian diperlukan keyakinan hakim dan alat bukti, sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, tetapi masih perlu dibarengi dengan "keyakinan hakim", bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

⁹ Lilik Mulyadi. Tindak Pidana Korupsi: PT.Citra Aditya Bakti. Bandung,2000,hal 14

Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP yaitu "pembuktian menurut undang-undang secara negatif". Artinya, disamping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹⁰

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan,

¹⁰ M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. .Sinar Grafika. Jakarta. 2005,hal 15

pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan

bukti yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Dengan kata lain, walaupun pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian, namun hakim tetap harus hati-hati, dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya. Karena pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

6. Metode Penelitian

6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum

6.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- 1). Comprehensif artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis
- 2). All inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada. Sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- 3). Systematic bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), akan lebih akurat bila dibantu oleh pendekatan yang lain dalam hal pendekatan tersebut adalah pendekatan Analitis (Analytical Approach) yang di maksud adalah analisis terhadap badan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Yang kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

7. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

1). Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi, perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

a). Undang–Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nomor 31 tahun 1999 Yang Sudah Di ubah Dengan Undang –
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2). Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹¹

8. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

¹¹ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 106

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan, perolehan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku ilmiah yang memuat pendapat beberapa sarjana.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini juga dikumpulkan, Bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyuntingan bahan hukum, pengklasifikasian bahan hukum yang relevan dan penguraian secara sistematis.

9. Metode Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka penulisan skripsi ini menggunakan metode content analysis, yaitu metode yang menganalisis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yang memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai hal umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

10. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data lapangan untuk menemukan

jawaban atas masalah. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah Kantor Pengadilan TIPIKOR Surabaya.

11. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari minggu terakhir. Tahap persiapan penelitian ini meliputi : penentuan judul penelitian, penulisan proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal. Tahap pelaksanaan penelitian selama 2 bulan terhitung mulai minggu terakhir bulan Januari sampai bulan Maret minggu pertengahan, meliputi pengumpulan sumber data primer dan sumber data sekunder.

12. Sistematika Penulisan Skripsi

Pemaparan dari sistematika penulisan ini bertujuan supaya di dalam proses penyampaian materi dari skripsi ini dapat mudah dipahami. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, pada tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi uraian dari isi tulisan ini yang bertujuan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas dalam skripsi ini. Bab I terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab II menjawab rumusan masalah pertama mengenai penerapan ketentuan pidana minimal oleh hakim Pengadilan Tipikor

Surabaya, Dalam Bab dua ini terdiri atas tiga sub Yang pertama perincian kasus tipikor di pengadilan tipikor Surabaya yang telah ditangani oleh pengadilan pengadilan tipikor Surabaya. Kedua mengenai pengaruh penerapan pidana minimal terhadap jumlah kasus tipikor dan yang ketiga analisis penerapan pidana minimal atas tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor Surabaya.

Bab III menjawab rumusan masalah kedua mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana minimal tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor Surabaya, Dalam bab ketiga ini terdiri atas dua sub bab yakni pertama gambaran pertimbangan – pertimbangan hakim tipikor di pengadilan tipikor Surabaya dalam menjatuhkan pidana minimal. Sub bab kedua tentang faktor – faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimal. Dalam sub bab kedua ini terdiri atas dua sub sub bab yakni tentang faktor internal dan kedua faktor eksternal.

Bab IV merupakan bab penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan proposal ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian dikemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan yang ada, yang sekiranya dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.